

**KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA
(STUDI KASUS PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU)**

Yadi Pranata

Email : pranatayadi03@gmail.com

Dibimbing oleh Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU**

**Kampus Bina Widya Km. 12,5
Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Telp/fax. 0761-63277**

ABSTRACK

This research is motivated by the phenomenon of maximal management of common-street parking in the city of Pekanbaru. Still unclear parking management system in the city of Pekanbaru that cause various effects such as land use do not have permission to be used as a parking lot, causing traffic jams.

This study aimed to investigate the implementation of the management conducted by the Department of Transportation UPTD Parking manage parking in the city of Pekanbaru and to identify factors - factors that affect the management of parking in the city of Pekanbaru. From the results of this study found several factors that affect the success of the management of parking, including factors that management systems are used, the coordination between the parties to the participation and awareness. The most dominating factor to cope with parking in the city of Pekanbaru permasalahan this is a factor of parking management system itself because this is the system that directs the management of this park.

The research was conducted in the city of Pekanbaru precisely in UPTD Parking Pekanbaru City Department of Transportation. Key informants in this research is the Head Of UPTD Pparking, managers, parking attendants to the public. The sampling technique is snowball sampling in data collection used the method of observation, interviews and documentation. After the data were analyzed by using qualitative descriptive analysis.

After a study found that the management of parking in the city of Pekanbaru has not been maximized, it can be seen from the theory of George R. Terry on the Management functions are reviewed based on four indicators, namely: planning, organizing, directing and monitoring.

Keywords: Management System, Cooperation, Parking

PENDAHULUAN

Dalam laju pembangunan pada setiap daerah yang ada di Indonesia, transportasi memegang peranan penting, karena transportasi adalah alat pengangkutan atau alat pemindah dari suatu tempat yang satu ketempat yang lain. Dalam perkembangan transportasi dari tahun ke tahun selalu meningkat. Baik itu

dari segi bentuk maupun fungsinya yang semakin canggih dan multifungsi. Tidak hanya Indonesia yang mengalami perkembangan kendaraan, tetapi seluruh kota besar di Indonesia yang salah satunya Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau, dimana kota ini merupakan salah satu kota yang mengalami perubahan dan pembangunan yang begitu pesat di

Pulau Sumatera. Berkembangnya Kota Pekanbaru menuju Kota Metropolitan di mulai dengan ditetapkannya Visi Kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang berbunyi :”*Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan Iman dan Taqwa*”.

Dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru 2021, Pemerintah Kota Pekanbaru menyusun misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan infrastruktur perkotaan, sistem transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan kota serta penataan ruang terintegrasi.
3. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan agama yang berkualitas dan terjangkau, pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatnya pemahaman masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Kota Pekanbaru ini, Kota Pekanbaru terus berbenah dan terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun, dimana perkembangan ini meliputi perkembangan penduduk, sector ekonomi, sosial, transportasi dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Dengan penambahan penduduk Kota Pekanbaru berdampak pada pertumbuhan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan masyarakat

dalam menunjang aktivitas dan kebutuhannya. Tetapi semakin banyak jumlah kendaraan bermotor semakin banyak pula jumlah pemakai kendaraan bermotor ini yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Seperti masyarakat yang tidak peduli fasilitas – fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sembarangan di jalan umum Kota Pekanbaru dalam hal ini akan menimbulkan ataupun memancing pungutan – pungutan liar oleh petugas parkir yang illegal. Maka dari itu untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perparkiran ke depannya.

Pengelolaan parkir merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di Kota Pekanbaru yang mana sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Jika pengelolaan parkir terus seperti ini dapat dipastikan pemerintah akan sulit untuk melakukan penataan kota dan permasalahan yang terjadi akan berdampak pada tidak stabilnya penerimaan daerah yang diperoleh dari sector parkir itu sendiri. Berdasarkan jumlah parkir sendiri juga mengalami peningkatan diiringi dengan meningkatnya jumlah kontraktor parkir beserta petugas parkirnya seperti dicantumkan dalam table berikut :

Tabel I.I
Jumlah Lokasi, Pengelola, dan Juru Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2009 s.d 2013

No	Tahun	Jumlah Lokasi Parkir	Jumlah Kontraktor	Jumlah Juru Parkir
1	2009	149	49	639
2	2010	172	61	672
3	2011	172	71	700
4	2012	189	80	728
5	2013	193	87	743

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 ada 193 lokasi

parkir yang dikelola atau diawasi oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Lokasi - lokasi tersebut dikelola oleh para pengelola parkir sebanyak 87 orang dengan petugas – petugas parkir dilapangan sebanyak 743 orang yang direkrut oleh masing – masing kontraktor parkir. Meskipun banyak pengelola ataupun petugas – petugas parkir tetapi masih saja ditemukan penyimpangan yang terjadi. Hal ini dirasakan penulis waktu memarkirkan kendaraan. Lokasi penyimpangan tersebut Jalan Soekarno – Hatta simpang pasar pagi arengka.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap fungsi pelaksanaan perparkiran, ditemukan fenomena – fenomena sebagai berikut :

1. Ditemukan terjadinya fluktuatif penerimaan retribusi parkir di jalan umum, yang disebabkan petugas parkir yang tidak menyetorkan bukti atau karcis parkir kepada pihak Dinas Perhubungan.
2. Tidak ada kontrak kerja sama antara pengelola dengan pelaksana parkir seperti yang ditentukan pada Peraturan Daerah.
3. Karna tidak ada kontrak kerja sama tersebut, berdampak pada tidak teraturnya pelaksanaan pengelolaan termasuk pelaksanaan dilapangan oleh para petugas parkir sehingga memicu ketidaktertiban lalu lintas kendaraan.
4. Masih ada petugas parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir umum yang berdampak kepada hasil penerimaan retribusi parkir umum.
5. Serta masih banyak ditemukan karcis parkir yang ilegal atau palsu yang tidak sesuai dengan karcis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan. Sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pasal 256 yang berbunyi ***“Pengadaan Karcis Retribusi Parkir Pada Badan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan diporporasi oleh Dinas Perhubungan”***.

6. Ditemukannya petugas parkir yang tidak mengenai seragam dan tanda pengenal petugas parkir saat melakukan tugas parkir umum di Kota Pekanbaru.

Melihat fenomena – fenomena diatas, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Dimana penulis mengambil judul penelitian adalah : ***“Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (Studi Kasus Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru)”***.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan parkir di Kota Pekanbaru?
- b. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis
 1. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya
 2. Dapat diperunakan untuk menambah khasanah perpustakaan
- b. Praktis
 1. Bagi peneliti, sebagai wahana untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan ilmu administrasi
 2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru maupun pihak - pihak yang terkait dengan penelitian ini.
 3. Sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi dalam melakukan penelitian lanjutan.

D. KONSEP TEORITIS

1. Manajemen

Menurut **M. Manullang (2005:3)** mengemukakan bahwa manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu : *pertama*, manajemen sebagai suatu proses, *kedua*; manajemen sebagai kolektifitas orang - orang yang melakukan aktivitas manajemen, *ketiga*; manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda - beda defenisi yang diberikan oleh para ahli. Dalam *Encyclopedia Of The Social Science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya **Haiman** mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha - usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, **George. R. Terry (2006:4)** mengatakan

bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan - tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber - sumber daya lainnya.

2. Pengelolaan

Untuk mengukur dan melihat serta mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Di Kota Pekanbaru, dari sekian banyak fungsi - fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang dan perumusannya. Penulis mengambil pandangan dari salah satu seorang ahli manajemen yang bernama **George R. Terry** dalam bukunya *Principle Of Management* yang memutuskan fungsi dari pada manajemen yang disingkat dengan POAC :

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (**Terry dalam Dharmawan Setya Salam 2004:14**)

Terry dalam Winardi mengemukakan unsure - unsure dari perencanaan yaitu :

- a. *Procedur* (Prosedur)
- b. *Standard* (Standar)
- c. *Budget* (Anggaran)
- d. *Program* (Program)

2. Organizing (Organisasi)

Menurut **Robbin (2001:2)** pengertian dari organisasi adalah salah satu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi dan berwenang untuk mengerjakan usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi juga diartikan sebagai kolektivitas orang - orang yang berkerjasama

secara sadardan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu.

Gibson (1985:7) mendefenisikan organisasi sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Sementara **Drucker dalam Nugroho (2002:241)** mengungkapkan akan terbentuk masyarakat modern yaitu masyarakat organisasi.

3. Actuating (Penggerakkan)

Penggerakkan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras. Untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dari pihak pimpinan atau dapat juga diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (**Terry dalam Dharmawan Setya Salam 2004:20**)

Actuating mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai – pegawainya, member penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberikan kompensasi kepada mereka. **George R. Terry** dalam bukunya **Principle Of Management** mengemukakan bahwa alat – alat yang lazimnya dipergunakan oleh manajer untuk menggerakkan kelompok antara lain adalah perintah – perintah, petunjuk – petunjuk, bimbingan, surat edaran, rapat – rapat koordinasi, pertemuan – pertemuan dan sebagainya.

4. Controlling (Pengawasan)

George R. Terry (2006:395) mengemukakan bahwa pengawasan memiliki arti *“Control is determine what is accomplishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”* artinya suatu tindakan yang mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, hal

ini memiliki maksud mengevaluasi prestasi kerjadan jika diperlukan menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas menemukan, mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas – aktivitas yang direncanakan tersebut.

3. Pengawasan

Earl P. Strong dalam **Brantas (2009:189)** mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar suatu pelaksanaan sesuai dengan ketetapan – ketetapan dalam rencana.

Manullang (2005:172) dalam bukunya *Dasar – Dasar Manajemen*, mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Bentuk Kontrak Pelayanan

Sedangkan **Amirullah** dalam (**Irianti, 2011**) menyatakan, *Public Private Partnership* adalah kerjasama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Kerjasama merupakan suatu konsep yang dilandasi oleh kepercayaan dalam sebuah tim kerja untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan antar anggota mitra di mana setiap anggota mitra selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan secara prosedural sehingga akan menguntungkan masing-masing pihak.

Dalam konteks kemitraan antara pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership menurut **Mahmudi (2007)**, dimaknai sebagai unit kerja penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) yang bekerjasama dengan sektor swasta dan sektor ketiga.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang disingkat dengan istilah "KPS" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Public Private Partnership*" atau "*PPP*" adalah suatu kerjasama dalam penyediaan infrastruktur (seperti halnya penyediaan jalan tol, energi listrik, air minum & Sanitasi) antara Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan mitra badan usaha swasta, baik badan usaha dalam negeri ataupun badan usaha asing. Kerjasama tersebut meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun, meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik (**Bappenas, 2009**).

5. Organisasi

Organisasi merupakan sebuah system yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting dan dimana terlihat bahwa masing-masing merupakan subsistem yang saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan, **Winardi (2006:13)** organisasi dibentuk oleh manusia untuk memenuhi aneka macam kebutuhannya seperti kebutuhan politik, ekonomi, intelektual, dan lain sebagainya.

Menurut **Sutarto (2006:61)** mengemukakan organisasi adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan orang – orang yang berada didalamnya, baik yang bersifat kebendaan maupun kerohanian. Segala kebutuhan tersebut dapat tercapai apabila organisasinya sehat dan produktif, dimana setiap elemen yang berada dalam

organisasi tersebut paham akan peran hak dan kewajiban mereka masing – masing oleh karena itu sangat diperlukan adanya kesadaran elemen yang sudah ada didalam organisasi tentang perlu dan pentingnya menguasai azas – azas organisasi dalam praktek. Azas – azas organisasi yang dimaksud adalah perumusan tujuan dengan jelas, departemenisasi dan pembagian kerja, koordinasi, pelimpahan wewenang, kesatuan pemerintah dan keberlangsungannya.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi terjadi. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau mengubah pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Langkah – langkah itu adalah mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian dianalisa dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu berupa pernyataan – pernyataan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni data yang peroleh langsung dari responden melalui wawancara sebagai hasil penelitian, yaitu dari masyarakat yang menyebarkan kuesioner, data yang diperoleh dari pengawas dan juga juru parkir saat melakukan wawancara, serta data sekunder, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau keterangan sumber – sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti.

Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dari instansi terkait dan sumber-sumber lain, kemudian data-

data tersebut dianalisa secara kualitatif yang selanjutnya dijabarkan secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan kenyataan Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta (Studi Kasus Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menciptakan ketertiban kota guna melancarkan lalu lintas kendaraan dan sebagai suatu upaya untuk menggali sumber – sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan ke dalam 4 (empat) indikator yang merupakan fungsi dari manajemen yang dapat menerangkan bagaimana pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, penulis meneliti dari sudut manajemennya dengan mengadopsi teori George R. Terry yang meliputi indikator–indikator sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Penggerakan/pengarahannya (Actuating)
4. Pengawasan (Controlling)

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan dalam pengelolaan parkir meliputi penyelenggaraan parkir, sistem penyelenggaraan parkir dan juga kewajiban pengelola dan juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Bab XXII yang membahas mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan parkir. Pelaksanaan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui perpanjangan

UPTD Parkir yang khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di lapangan pengelolaan parkir diserahkan kepada pengelola atau koordinator yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam perencanaan pengelolaan parkir di tepi jalan umum, sistem yang digunakan adalah *Sistem Kontrak* yang dilakukan antara Pemerintah dengan para koordinator atau pengelola parkir sesuai yang tertera pada Pasal 249 ayat 3 Bab XXII di Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di kota Pekanbaru. Petugas parkir dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator parkir terhadap setoran parkir, kelancaran lalu lintas kendaraan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir selama berada di tempat parkir. Kemudian juru parkir menerima uang retribusi dari pengguna jasa parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan. Dalam pengaturan kendaraan, setiap parkir dituntut untuk mengatur kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan, melengkapi sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebagai syarat menjadi seorang juru parkir.

Dari hasil proses wawancara dengan informan penelitian dapat menyimpulkan bahwa hasil penelitian pada indikator perencanaan atau planning masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan walaupun perencanaan dalam mengelola parkir di tepi jalan umum tergolong dapat dipahami, akan tetapi perencanaan ini tidak cepat atau belum dapat untuk menyesuaikan diri atau mengikuti kondisi perubahan dilapangan. Dimana hal ini akan mempersulit pelaksanaan atau penerapan rencana – rencana tersebut. Dan juga permasalahan parkir ini juga timbul karena kurangnya tindakan yang tegas yang dilalukan dalam mengatasi pelanggaran yang ada.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Dari penjelasan – penjelasan dan hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil

penelitian pada indikator pengorganisasian (organizing) dalam hal pembagian kerja sudah dilakukan dengan baik. Dan hanya saja pada indikator koordinasi masih ada beberapa masalah dalam menjalankan pengelolaan parkir antar pihak – pihak yang terlibat didalamnya. Jika koordinasi antar bagian tersebut terhambat, maka proses pelaksanaannya pun akan mengalami kesulitan. Tetapi jika permasalahan pada koordinasi ini dapat berjalan dengan baik otomatis juga akan meningkat PAD Kota Pekanbaru.

3. Penggerakan/Pengarahan (Actuating)

Dari beberapa wawancara mengenai indikator penggerakan atau pengarahan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini belum dapat terealisasi seperti yang sudah diatur dalam perencanaan, terutama dalam merealisasikan tujuan. Pengarahan pemerintah kepada personil yang ada pada UPTD Parkir dalam melakukan pengelolaan parkir di tepi jalan umum tersebut, belum pernah memberikan pendidikan dan pelatihan. Sehingga kinerja yang dihasilkan kurang maksimal. Kemudian dalam merealisasikan tujuan pihak pemerintah khususnya terkait sistem yang digunakan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Contohnya pada sistem penetapan target retribusi hanya berdasarkan perkiraan saja setelah melihat potensi pada lokasi – lokasi parkir tersebut. Disini pihak UPTD seharusnya dapat lebih teliti lagi untuk penetapan target retribusi yang akan dicapai. Misalnya pihak UPTD dapat melakukan tinjauan akan potensi terhadap lokasi – lokasi parkir terlebih dahulu sebelum menetapkan target yang akan dicapai. Namun hal – hal itu tidak ada dilakukan oleh pihak UPTD Parkir sendiri khususnya dan hal inilah yang menyebabkan bertambah parahnya kondisi perparkiran yang ada di Kota Pekanbaru.

4. Pengawasan (Controlling)

Dalam penelitian ini bahwa upaya pengawasan belum maksimal. Karena pengawasan yang dilakukan tidak merata, padahal lokasi – lokasi tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi. Seperti lokasi parkir di Jalan HR. Soebrantas dan Jalan Tuanku Tambusai, disana masih banyak dijumpai petugas parkir yang tidak mengenakan atribut apalagi penggunaan karcis. Selain itu, hal ini juga didukung oleh kurangnya ketegasan hukum yang berlaku dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Seperti dalam pemberian sanksi yang lebih tegas masih kebentur pada Perda yang merupakan pedoman mereka untk melakukan penertiban dan juga jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan lokasi parkir beserta masalahnya . Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak UPTD Parkir, pengawasan juga dilakukan oleh Wali Kota. Wali Kota melakukan pengawasan terhadap berjalannya peraturan daerah yang telah dijalankan dinas perhubungan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Wali Kota berupa sharing tau pelaporan yang datang dari Dinas Perhubungan.

Disimpulkan bahwa dari upaya – upaya perbaikan pengelolaan parkir yang dilakukan pihak UPTD Parkir untuk penertiban parkir mulai dari pengawasan langsung ke lapangan, razia sampai pemberitahuan aturan parkir terbukti belum efektif dan efesian. Karena upaya ini dilakukan belum menyeluruh ke titik – titik lokasi parkir dan elemen masyarakat. Pengelolaan parkir di tepi jalan umum harus memiliki sistem pengelolaan yang lebih baik lagi sampai pemberian sanksi yang lebih tegas lagi pada setiap pelanggaran yang terjadi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ditemukan

beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru. Disini penulis akan menguraikan faktor – faktor tersebut berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan dengan berpedoman pada teori *Tool Of Management* dari G.R. Terry. Adapun faktor – faktor tersebut sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Meski perintah – perintah pelaksanaan kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber – sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan parkir oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan. Bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

2. Sistem Pengelolaan Parkir Yang Digunakan

Sistem merupakan suatu mekanisme bagaimana pelaksanaan dari suatu pengelolaan yang digunakan. Sistem pengelolaan parkir merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan parkir sendiri. Walaupun suatu perencanaan yang dilaksanakan dengan sumber daya yang cukup memadai , namun jika tidak

dibarengi dengan sistem pelaksanaan yang baik juga, maka dapat dipastikan sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling dasar dan sangat penting pada sistem pengelolaan parkir ini ialah sistem manajemen yang mengatur pengelolaan parkir ini yaitu PERDA. Karena perda yang digunakan sekarang untuk mengelola parkir saat ini belum mampu mengatasi permasalahan yang ada melihat kondisi Kota Pekanbaru yang terus berkembang. Dalam rancangan perda yang baru diharapkan pihak UPTD dapat lebih rinci lagi seiring meilhat perkembangan Kota Pekanbaru dalam penerapan sistem pengelolaan parkir yang lebih baik lagi hingga pemberian efek jera yang lebih tegas lagi kepada pelanggar. Seperti penerapan sistem denda atau pengembosan bagi setiap pelanggar. Didalam perda yang digunakan saat ini sanksi yang seperti itu tidak ada, hanya pemberian tilang dan derek bagi pelanggar sehingga menimbulkan tidak efek jera pada pelanggar. Dan juga sistem pemberian denda ini juga harus dilengkapi dengan CCTV untuk disetiap titik – titik lokasi parkir dengan tujuan untuk mengawasi sendiri apakah ada pelanggaran untuk tercapainya pengelolaan parkir yang aman dan tertib. Sistem ini dapat direalisasikan tanpa harus merepotkan pengawas untuk terjun langsung ke lapangan dan serta juga membantu tugas pengawas dalam menjalankan tugasnya. Pada penerapan sistem ini, pelanggar yang dikenakan dapat membayar denda ketika mereka melakukan pembayaran pajak kendaraan yang dimana disertai bukti dari rekaman CCTV. Dimana sistem ini otomatis langsung meningkatkan PAD Kota Pekanbaru dan sistem ini juga sudah dicanangkan Kota besar di Indonesia seperti di Jakarta dan Bandung.

3. Partisipasi Masyarakat

Faktor partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dari partisipasi masyarakat disini ialah keikutsertaan, kepedulian dan serta kesadaran masyarakat dalam pengelolaan parkir oleh UPTD Parkir Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan parkir disini dapat berupa pengaduan atau pelaporan akan pelanggaran mengenai penyelenggaraan parkir dilapangan yang dikelola oleh pihak UPTD Parkir dalam hal ini. Dan juga partisipasi masyarakat juga dapat disalurkan melalui kritik dan saran melalui media berupa penyampaian berita di televisi dan koran contohnya. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mematuhi dan memahami peraturan yang ada. Misalnya memahami rambu – rambu tentang parkir, memahami petugas resmi dari Dinas Perhubungan. Dan disini masyarakat juga sadar dan tegas hendaknya untuk tidak memberikan retribusi parkir kepada petugas parkir yang tidak memiliki izin dari Dinas Perhubungan. Hal ini sesuai dengan himbauan Bapak Walikota beberapa waktu lalu bahwa dihimbau kepada masyarakat untuk tidak menyerahkan atau membayar retribusi parkir jika tidak diberikan karcis oleh petugas. Yang dimana tujuan feedbacknya untuk masyarakat sendiri, sehingga mereka dapat merasakan keamanan dalam memarkirkan kendaraan mereka. Kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam memarkirkan kendaraan mereka seperti ditempat yang jelas sudah ada terpasang rambu dilarang parkir, hal ini juga bermaksud untuk kelancaran mobilitas kendaraan sebagai pengguna jalan. Faktor partisipasi masyarakat memberikan pengaruh yang berbeda lagi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan parkir di tepi jalan umum ini, selain membantu pemerintah dalam menyukseskan peraturan daerah yang ada juga sangat membantu dalam meminimalisir pelanggaran – pelanggaran yang terjadi dilapangan. Faktor partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan parkir di tepi jalan umum. Jika masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa parkir dalam pengelolaan parkir ini, tentunya pemerintah juga merasa terbantu untuk lebih mudah dalam pengelolaan parkir ini. Termasuk juga kerjasama dengan masyarakat dalam memberikan informasi kepada pemerintah mengingat masyarakatlah pihak pertama yang menggunakan dan merasakan jasa parkir.

4. Dana / Biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengelolaan parkir sendiri pihak Dinas Perhubungan mengatakan bahwa sumber dana untuk menjalankan kegiatan – kegiatan dalam rangka mewujudkan rencana yang telah dibuat, pihak dinas mendapatkan dana dari pihak Walikota. Hal ini karena peihak dinas tidak memiliki anggaran sendiri dalam rangka pengelolaan parkir. Misalnya kegiatan – kegiatan terkait pengawasan seperti razia dan sosialisasi kepada masyarakat. Razia parkir sendiri merupakan program yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang didanai oleh Walikota. Permasalahan dana ini sebenarnya sangat memiliki peran dalam pelaksanaan tanggung jawab dari setiap petugas parkir. Karena sebelumnya telah dibahas bahwa dalam pembagian hasil pemungutan retribusi, petugas parkir hanya mendapatkan 40% dari jumlah keseluruhan yang diterima. Jumlah ini diakui oleh petugas parkir sangat kurang untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya. Hal ini mendorong mereka untuk mencari cara bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari hasil pemungutan retribusi parkir. Faktor dana / biaya ini jelas sangat mempengaruhi kelancaran proses pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru ini, maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan kesimpulan dalam pemulisan ini, yaitu :

1. Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Pekanbaru

Dilihat dari semua indikator yang telah disajikan, dapat dikatakan bahwa pada pada pelaksanaan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru mulai dari perencanaan hingga pengawasan dinilai "*masih belum terlaksana dengan baik*". Masih dijumpai beberapa hal yang harus perlu dirubah ke depannya agar pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru ini dapat maksimal, diantaranya yaitu :

- a. Pada perencanaan yang merupakan langkah awal untuk mewujudkan keberhasilan suatu tujuan organisasi saja pihak Dishub khususnya UPTD Parkir saja sudah salah dalam menentukan langkah. Hal ini karena perencanaan yang mereka buat tidak sesuai dengan peraturan daerah sehingga terkesan perencanaan ini berjalan sendiri. Di mana indikator inilah yang memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan keberhasilan dari pengelolaan parkir ini.
- b. Pengorganisasian, pada indikator ini walaupun pembagian kerja yang sudah dilakukan dengan baik, namun koordinasi yang dilakukan

oleh pihak UPTD Parkir pada pihak – pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini dinilai masih kurang. Koordinasi yang dilakukan hanya sampai batas pengelola saja, untuk koordinasi antara pihak UPTD Parkir dengan petugas parkir itu tidak ada. Walaupun didalam perda pengelola dituntut untuk melakukan pembinaan kepada petugas parkir. Namun apabila hanya sebatas itu tidak cukup karena arena koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan parkir ini sangat penting guna mengetahui kendala – kendala yang dijumpai oleh salah satu pihak.

- c. Penggerakan, pada indikator ini juga masih belum terlaksana dengan maksimal. Karena sistem yang tertera didalam perda ialah sistem kontrak dengan ketentuan diberlakukannya karcis retribusi. Namun kenyataannya dilapangan tidak demikian sehingga pengelolaan tidak maksimal. Dan juga pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru masih ada yang di monopoli oleh sebagian masyarakat.
 - d. Pengawasan, pada indikator yang terakhir in juga dinilai masih belum baik. Hal ini terbukti dari masih dijumpai pelanggaran – pelanggaran parkir mulai dari pengguna jasa parkir, lokasi parkir hingga petugas parkir seperti semerawutnya tatanan parkir dilapangan.
- ### 2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru dinilai juga "*masih belum maksimal*". Karena masih dijumpai beberapa masalah yang

menghambat pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru, diantaranya sebagai berikut :

- a. Faktor sumber daya manusia yang meliputi jumlah personil dan kecakapan personil yang berkaitan dengan pemahaman prosedur kerja dan tanggung jawab yang diemban memiliki pengaruh pada kinerja yang dihasilkan dalam melakukan pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. serta memahami akan tugasnya untuk menata sebuah lokasi parkir.
- b. Faktor sistem yang digunakan sangat berpengaruh pada bagaimana mekanisme pelaksanaan dalam pengelolaan parkir. Faktor sistem ini sangat mempengaruhi pengelolaan parkir karena sistem ini berkaitan dengan bagaimana perencanaan pengelolaan dilakukan. Jadi jika sistem yang digunakan sesuai dengan perencanaan, maka pengelolaan parkir akan lebih baik terarah dengan jelas.
- c. Faktor partisipasi masyarakat merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan parkir itu sendiri. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pihak pemerintah mengoreksi kinerja mereka hingga mengurangi penyimpangan yang terjadi seperti dengan memberikan laporan kepada pemerintah, kritik dan saran maupun partisipasi berupa masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap tujuan dari pengelolaan parkir.
- d. Sedangkan faktor biaya juga menentukan lancarnya program kegiatan yang dilaksanakan. Karena dana yang kurang otomatis memaksa pengawasan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan lancar. Faktor biaya ini

juga mempengaruhi kejujuran dan tanggung jawab setiap pihak dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan parkir ini.

SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan dan masalah – masalah yang ditemukan, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat membangun maupun dijadikan suatu masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait dalam memaksimalkan pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebaiknya pemerintah lebih teliti dan fokus lagi dalam menentukan perencanaan –perencanaan yang sesuai dengan peraturan daerah agar hasil dari pengelolaan parkir ini tidak menyimpang.
- b. Seharusnya pemerintah ada melakukan pembinaan tentang pengelolaan parkir ini mulai dari pihak UPTD Parkir, pengelola, hingga petugas parkir. Sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia dan kinerja yang lebih baik lagi.
- c. Dalam koordinasi sebaiknya ke dean pihak UPTD Parkir dapat lebih meningkatkan lagi koordinasi antar unit yang terkait didalam pengelolaan parkir dengan tujuan agar pengelolaan parkir dapat dilaksanakan dengan mudah dan lancar.
- d. Sebaiknya pihak pemerintah khususnya UPTD Parkir dapat lebih meningkatkan lagi terhadap pengawasan parkir di tepi jalan umum. Pengawasan dapat dilakukan secara terus menerus dengan maksud agar pengawasan disini dapat mengetahui perkembangan potensi parkir yang juga didukung oleh dana/biaya yang cukup untuk menjalankannya.
- e. Seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam memberi dan menjalankan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terjadi agar. Seperti

pengembosan, pengembokan roda hingga denda yang cukup besar dengan maksud agar pelanggar jera untuk melakukannya kembali.

- f. Agar cepat untuk merealisasikan wacana kerjasama kemitraan dengan pihak swasta di dalam pengelolaan parkir di tepi jalan umum ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bergkamp, D. 2011, *Kemacetan Brantas*. 2009. *Dasar - Dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Gibson, James L, dkk. *Organisasi*, Erlangga : Jakarta, 2005
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen, edisi ke 2 BPFE – Yogyakarta: Yogyakarta*.
- Handoko, T Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta
- Hasibuan, H. Malayu. 2005. *Manajemen* . Bumi Aksara: Jakarta.
- Hasibuan, H. Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Harsoyo, 2001, *Pengelolaan*. Bandung: Erlangga.
- Hadaningrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Study Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Kencana, Inu. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Perca.
- Manullang., M. 2005. *Dasar – Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Marnis. 2008. *Pengantar Manajemen*. Unri Press: Pekanbaru.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polici*. PT. Media Elek Komputindo: Jakarta.
- Robbin. 2001. *Sistem Pengendalian Dan Perencanaan Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta.
- Salam. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Quantum.
- Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Siagian, Sondang. 1997. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2006. *Manajemen Oragnisasi*. Werda Pers: Surabaya.
- Stoner, James A. F. 1982. *Manajemen, Jilid 1*. Erlangga: Jakarta.
- Terry. R George. 2003, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta.
- Terry, George R. 2006. *Azas – Azas Manajemen*. PT Alumni: Bandung.
- Thoah, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar Dan Aplikasinya)*.

UGM Fisipol. PT. Raja Grafindo
Persada: Jakarta.

Wardoyo. 2006. *Teori Organisasi Dan
Pengorganisasian*. Pers: Jakarta.

Winardi, J. 2004. *Manajemen Perilaku
Organisasi*. Kencana Perdana Media
Group: Bandung

2. Karya Ilmiah

Zulfachmi, 2012. Pelaksanaan
Pengawasan Parkir Umum di
Kota Pekanbaru, Pekanbaru:
Universitas Riau.

Iffa Fauziah, Fitri. 2012, Analisis
Pengelolaan Kebersihan di
Kecamatan Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru, Pekanbaru;
Universitas Riau

3. Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 14 Tahun 2001 Tentang
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Perparkiran.
3. Peraturan Daerah kota Pekanbaru
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun
2001

4. Website

1. KPPU, Kategori Artikel.
[www.kppu.go.id/id/2010/07/kerjasa
ma-pemerintah-dan-swasta-pada-
sektor-infrastruktur/](http://www.kppu.go.id/id/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-infrastruktur/). 28/07/2010.
2. Annisa Muawanah.
[http://annisamuawanah.wordpress.co
m/2013/07/31/public-private-
partnership-kerjasama-pemerintah-
swasta/](http://annisamuawanah.wordpress.com/2013/07/31/public-private-partnership-kerjasama-pemerintah-swasta/). 31/07/2013